

KORAN
DIGITAL

radar. MEDIA

T E R D E P A N

EDISI RABU
11 OKT 2023



**DINKES KALTIM
OPTIMALKAN PENURUNAN
KASUS DBD**



BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023, FOKUS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN

SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Bedah Perpres 53 tahun 2023 tentang Perubahan Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) mulai berlaku 11 September 2023 di Samarinda, Senin (9/10/2023).

Bimtek Bedah Perpres 53 tahun 2023 ini dibuka oleh Sekretaris BPKAD Aji Salehuddin yang mewakili Kepala BPKAD yang berhalangan hadir dan diikuti 23 Perangkat Daerah atau 290 peserta pejabat dan staf yang membidangi pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran.

Bedah Perpres 53 tahun 2023 ini menghadirkan Analis Perencanaan Daerah Andika Meizar Putra dari Direktorat Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri RI).

Dalam arahannya, Aji Salehuddin mengingatkan agar dalam penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah harus berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dalam Perpres 53 tahun 2023. Hal ini sangat penting karena menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan acara efektif dan efisien.

"Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang "good and clean governance" dengan "prinsip money follow program" demi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Salehuddin.

Lebih lanjut, Salehuddin menjelaskan dalam sistem penganggaran sering tidak efektif, efisien, transparan dan kadang tidak tepat sasaran. Bahkan sektor anggaran yang berlebihan dan ada

yang kekurangan. Sehingga Kemendagri RI menelorkan prinsip "value for money and spending better" suatu sistem penganggaran keuangan harus tepat sasaran, efektif dan efisien.

"Dalam menyusun program dan kegiatan harus berpedoman pada tiga hal yakni anggaran berbasis kinerja, sesuai dengan RKPD serta pembiayaan yang terukur dan bertanggung jawab," jelas Saleh.

Diakhir sambutannya, ia berharap agar seluruh peserta Bimtek Bedah Perpres 53 tahun 2023 ini dapat mengikuti dengan serius dan penuh tanggung jawab agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan administratif yang mengakibatkan temuan pemeriksaan dan bwrujung pada pengembalian belanja.

Pewarta : Irfan Aditam
Editor : Nicha Ratnasari



Widya Astuti & Andika Arifin - Pelajar SMK Medika Samarinda

EKSISTENSI PERPUSTAKAAN DARI KACAMATA GEN Z

SAMARINDA - Di tengah kecanggihan teknologi dan banyaknya koleksi e-book, membaca buku di perpustakaan masih menarik minat Gen Z.

Hal ini pun terlihat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mayoritas dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan Widya Astuti dan Andika Arifin, pelajar SMK Medika Samarinda yang tengah berkunjung ke DPKD Kaltim.

Siang itu, Widya dan Arifin berniat untuk mencari bahan bacaan guna mengerjakan tugas sekolah atau sekadar menyisihkan waktu luang untuk membaca buku.

"Kami ditugaskan untuk mengulas buku novel. Nah, novel yang kami pilih adalah novel bertema horor, karena lebih menarik", ucap Widya dan dibenarkan Arifin.

Menurut Widya, saat ini banyak bacaan berupa buku digital, tapi muatan ilmu pengetahuannya kurang lengkap. Oleh sebab itu, Widya dan Arifin ini memilih keperpustakaan

Kaltim untuk mencari buku fisik karena di dalam buku fisik itu lebih lengkap.

"Buku secara fisik itu lebih lengkap dan ada daftar pustaka dan rujukan yang lainnya", ungkapnya.

Selain itu Widya berharap untuk pelajar-pelajar yang lain untuk meramaikan perpustakaan Kaltim, untuk meningkatkan budaya literasi agar tidak tergantung dengan media sosial.

"Penting adanya perpustakaan untuk meningkatkan literasi, karena di internet pun informasi belum tersaring banyak berita hoax," ujar siswi kelas 12 SMK Medika ini

Widya juga mengungkapkan bahwa lebih nyaman membaca buku di perpustakaan. Terlebih lagi fasilitas yang telah disediakan oleh DPKD Kaltim juga lengkap.

"Yuk kesini kita memanfaatkan fasilitas yang ada disini untuk menambah wawasan kita", ajaknya. (**dsy/ADV/dpkd**)

Pewarta : Desy Alvionit
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi. (kiri)

Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah. (kanan)

DPK Kota Samarinda Akan Sosialisasi Pentingnya Naskah Kuno

SAMARINDA - Demi menyelamatkan naskah kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang naskah kuno agar naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat bisa dibantu untuk dilestarikan.

"Sementara ini kita akan sosialisasi soal naskah kuno, karena kita belum mengkaji ini. Jadi langkah awal kita akan sosialisasikan, setelah terkumpul informasinya kita akan kunjungi," ujarnya kepada MediaKaltim.com Selasa (10/10).

Diketahui naskah kuno adalah naskah yang bertuliskan isi sejarah, ramuan tradisional, agama dan lainnya yang berumur di atas 50 tahun dan ditulis menggunakan tangan.

Edy Wahyudi mengatakan naskah kuno dengan usianya yang sangat berumur tentunya sangat rentan rusak. Untuk itu, DPK Kota Samarinda mengimbau masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya kepada DPK Kota Samarinda sebagai upaya melestarikan naskah kuno yang dimiliki masyarakat.

"Naskah kuno yang dimiliki masyarakat boleh dititipkan ke DPK Kota Samarinda untuk dilestarikan. Kami akan alih me-

diakan dan kita akan berikan sertifikat kepemilikan naskahnya. Tapi kalau masyarakat tidak berkenan dititipkan, maka kami mengajarkan cara merawatnya, karena menjaga naskah kuno itu tidak sembarangan," ungkapnya.

Sementara itu Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah, menyebutkan selama ini belum ada penggalan informasi terhadap naskah kuno yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu, pihak DPK Kota Samarinda akan menggali informasi tentang keberadaan naskah kuno yang dilaporkan masyarakat ke DPK Kota Samarinda.

"Nah kita dapat informasi ada Alquran kuno di Masjid Shiratal Mustaqiem, Samarinda Seberang dan naskah yang ditulis di atas daun lontar dimiliki masyarakat. Kami belum punya tim ahli untuk meneliti berapa umur dari Alquran kuno tersebut. Oleh sebab itu m, kita akan kerjasama dengan Perpustakaan untuk melihat apakah ini benar kategori naskah kuno atau bukan," ujarnya.

Naskah kuno ini sangat penting diawetkan dan dilestarikan agar bisa dipelajari oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

"Tentunya ini akan dijadikan sejarah, agar generasi akan datang bisa tau bahwa sejarah ditempat kita ada naskah kuno nya," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
Wakil Gubernur Kaltimdr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

RAPIM BERSAMA PJ GUBERNUR, JAYA AJUKAN PROGRAM LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK STUNTING

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin mengatakan pihaknya tengah mengajukan beberapa program rencana pembangunan bidang kesehatan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga ibu dan anak pada rapat pimpinan bersama penjabat gubernur.

"Kami melaporkan beberapa indikator kesehatan yang menjadi prioritas, seperti angka kematian ibu dan anak, persalinan di fasilitas kesehatan (faskes), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, dan stunting," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Selasa (10/10/2023).

Jaya juga menyatakan, stunting yang menyebabkan kecerdasan pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius, karena mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak.

"Stunting pada 2022 angkanya naik dari 22,8 persen menjadi 23,2 persen. Angka ini agak lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Makanya kami berharap dengan program ini bisa menurunkan angka stunting menjadi 21,4 persen pada tahun 2023 dan 12,83 persen pada akhir 2024," imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya sedang menunggu hasil survei kesehatan yang akan dirilis dalam waktu dekat. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat Kaltim.

"Kami berharap survei ini bisa memberikan informasi yang valid dan terpercaya, sehingga kami bisa mengevaluasi dan meningkatkan program-program kesehatan yang sudah ada," tutupnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernit**Editor : Nicha Ratnasari**



Dinkes galakkan penurunan stunting di Kaltim. (Istimewa)

ANGKA STUNTING DI KALTIM TINGGI, DINKES LAKUKAN PANTAUAN GIZI D/S

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas peningkatan capaian program gizi dengan istilah D/S. D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan bayi dan balita melalui kegiatan posyandu," ungkap Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim Muhammad Maulana Fahmi, Senin (9/10/2023).

Fahmi mengatakan, pemantauan pertumbuhan adalah salah satu kegiatan utama program dalam perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.

Dikemukakannya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.

Untuk angka tersebut masih tergolong tinggi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO), yang menetapkan batas aman prevalensi stunting maksimal 20 persen.

"Kami ingin menurunkan angka stunting di Kaltim, khususnya di wilayah calon ibu kota baru dan sekitarnya," jelasnya.

Fahmi juga menjelaskan, pemantauan status gizi pada balita dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan posyandu setiap bulan berdasarkan indikator SKDN, di mana S adalah sasaran balita di suatu wilayah, K artinya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), D yaitu balita yang ditimbang berat badannya, dan N adalah balita yang ditimbang dan naik berat badannya.

"Kami juga ingin meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di Posyandu," bebernya. Sementara itu, pertemuan peningkatan capaian D/S tingkat provinsi itu berlangsung dari tanggal 9-11 Oktober 2023. Diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 20 peserta dari kabupaten/kota dan 13 peserta dari provinsi. Peserta berasal dari lintas sektor dan lintas program Dinas Kesehatan Kaltim. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN<http://dinkes.kaltimprov.go.id>Dra. Sri Wahyuni M.P.P.
SEKDA INKON KALTIMDr. Akmal Malik, M.Si
PD CLINISIMJUS KALTIMdr. H. Jaya Muslimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Rumah sakit Sepaku merupakan kesehatan untuk melayani pekerja yang ada di IKN. (Media Kaltim)

PERSIAPAN IKN, DINKES KALTIM BAKAL PENUHI KEBUTUHAN SDM RUMAH SAKIT SEPAKU

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kawasan Sepaku saat ini hanya ada satu Rumah Sakit kelas D, dan ada 5 Puskesmas.

"Kami masih terus berbenah untuk fasilitas kesehatan yang ada di sana. Apalagi untuk menyambut IKN, tentu seperti rumah sakit kelas D akan menjadi kelas C," ungkap Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati, Selasa (10/10/2023).

Pemerintah daerah pun tak hanya menyerahkan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga menyiapkan anggaran untuk membantu rumah sakit yang berada di IKN, dalam program Major Project.

"Ya jadi major project itu merupakan

program gubernur Kaltim kepimpinan Isran-Hadi. Di mana, dalam program tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan," bebernya.

Diketahui, anggaran sarana prasana telah disiapkan sebesar Rp10 miliar se-Kaltim, dari 2024-2026.

Akan tetapi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah IKN belum mencukupi. Sedangkan, sarana prasarana seperti tempat tidur pasien rumah sakit belum memenuhi, dan akan ditingkatkan sebelum tahun 2024.

"Untuk upaya dinas kesehatan Kaltim sendiri, tentu terkait penyediaan SDM, sarana prasarana harus dipenuhi semua," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati. (Media Kaltim)

SELURUH PUSKESMAS SE-KALTIM WAJIB TERAKREDITASI

SAMARINDA- Ada sebanyak 188 Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, masih tersisa 6 Puskesmas yang belum memiliki akreditasi.

Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati mengatakan, sejak tahun 2022 seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan memiliki akreditasi. Sehingga masih ada 6 puskesmas dari 188 yang belum terakreditasi.

"Kementerian kesehatan membentuk 13 lembaga yang akan menilai puskesmas tersebut. Dan di tahun ini akan ada 4 puskesmas yang akan diakreditasi," jelas dr Rony

Setiawati, Selasa (10/9/2023).

Lebih lanjut, untuk pembiayaan akreditasi akan dibebaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Di mana jika sebelumnya, biaya akreditasi dibebankan kepada pemerintah pusat.

"Nantinya akan ada 5 penilaian untuk akreditasi, seperti paripurna, utama, madya, dan dasar. Jadi tidak ada puskesmas yang tidak lolos akreditasi, hanya saja penilaian setiap puskesmas berbeda," tutupnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



DINKES KALTIM OPTIMALKAN PENURUNAN KASUS DBD



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

Dinkes Kaltim Optimalkan Penurunan Kasus DBD

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah optimis untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) di Kaltim.

"Angka DBD di Kaltim masih tinggi, dengan incident rate (angka kejadian) DBD di Kaltim adalah 85,2 per 100.000 penduduk dan case fatality rate (angka kematian) adalah 0,48 persen. Kami juga berhasil menurunkan angka kematian menjadi 50 persen sampai September kemarin," ungkap Kepala Dinkes Kaltim, Kamis (5/10/2023).

Ia menjelaskan ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan warga untuk menekan angka DBD, salah satunya adalah dengan memiliki kebijakan terkait eliminasi atau percepatan

penurunan angka DBD.

"Alhamdulillah semua daerah di Kaltim sudah memiliki kebijakan tentang hal ini. Kegiatan dengan regulasi meliputi pengendalian vektor, penataan lingkungan, dan manajemen kasus seandainya ada anak yang terinfeksi," ujarnya.

Jaya juga menambahkan, penataan lingkungan dilakukan dengan menerapkan 3M, yakni mengurangi, menutup, dan mengubur tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kemudian gotong royong warga untuk membersihkan selokan, lingkungan, dan sampah agar tidak menjadi habitat nyamuk.

Adapun upaya fogging untuk membunuh nyamuk dewasa dan menggunakan abate sebagai pengendali jentik nyamuk. Akan tetapi, fogging tidak disarankan

karena bisa berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

"Sebaiknya menjaga pola lingkungan bersih dan sehat adalah pencegahan DBD terbaik," bebernya.

Adanya program jangka panjang, lanjut Jaya, melibatkan nyamuk yang sudah diberi bakteri Wolbachia yang dapat mengendalikan virus dengue. Program ini sudah dilakukan di lima kota di Indonesia termasuk Bontang.

"Kami kemarin kaji di Semarang sebagai pilot project Indonesia. Ada program untuk salah satu pengendalian vektor nyamuk yang diluncurkan bulan kemarin. Kami harap program ini berhasil dan bisa disebar ke daerah lain," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr Jaya Mualimin. (Istimewa)

Dinkes Kaltim Pertajam Implementasi Pergub Nomor 22

SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertajam pengimplementasian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2023 terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan.

"Pergub ini telah lama ditunggu dan dirancang terkait pengelolaan pemerintahan di bidang kesehatan. Adanya tata kelola kelembagaan rumah sakit umum daerah (RSUD) di beberapa pasal menjadi lingkup Dinkes," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023). Menurut Jaya, Pergub itu bertujuan untuk menyamakan persepsi dan indikator kinerja antara Dinkes dan seluruh rumah sakit yang ada di Kaltim.

Kegiatan yang berhubungan dengan layanan harus dilaporkan atau disinkronkan dengan indikator yang sudah dibuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu merupakan kunci Dinkes harus sama dengan apa yang dilakukan seluruh rumah sakit sehingga tidak ada yang berbeda.

Jaya menyebut Dinkes adalah dinas yang

menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan. Disini ada badan pengawas rumah sakit yang nantinya akan difungsikan apabila banyak keluhan dari masyarakat.

"Masyarakat boleh menyampaikan keluhannya. Kemudian kalau di puskesmas punya keluhan bisa ke dewan pertimbangan klinik. Silakan buat pengaduan semacam meminta menjembatani kalau tidak puas. Jika mau yang lebih besar ada Ombudsman, langsung ke sini kalau ada laporan," imbuhnya.

Ditambahkan Jaya, di Pasal 17 Pergub Nomor 22 tahun 2023 disebutkan bahwa rumah sakit dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

"Hal itu sebetulnya sangat relevan sekarang tren publik harus meningkatkan mutu layanan agar masyarakat luas luas. Karena dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan keuangan itu sangat membantu dalam pengelolaan masyarakat itu sendiri. Semua rumah sakit menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," tutup Jaya. **(nta/adv/Dinkes).**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin. (Istimewa)

DUA KASUS LEPTOSPIROSIS DI KALTIM, MASYARAKAT DIMINTA WASPADA KENCING TIKUS

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau kepada warga untuk mewaspadaai penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh kuman leptospira interrogans dari kencing tikus. Dan saat ini pihak Dinkes tengah menangani kasus tersebut.

"Hingga saat ini hanya ada satu orang yang dilaporkan mengidap leptospirosis dari Kutai Barat dan sudah sembuh. Sementara itu, tidak ada pasien yang dirawat akibat leptospirosis di Bontang, namun di sana ditemukan tikus yang positif bisa menularkan leptospirosis," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Kamis (5/10/2023).

Dijelaskannya, leptospirosis bisa menular melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar kencing tikus. Adapun gejalanya yakni demam,

sakit kepala, nyeri otot, kuning, dan gangguan ginjal.

Jaya menyebutkan, Dinkes Kaltim telah melakukan pemeriksaan hewan dari beberapa sampel di daerah Kutai Barat dan Bontang. Tetapi belum ditemukan tikus yang positif dengan orang yang terkena penyakit pada dua daerah itu.

"Kami masih menyelidiki apakah ada orang yang terkena saat mandi atau mengonsumsi air yang tercemar kencing tikus. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan tikus di Kabupaten Mahakam Ulu, karena ada laporan ada pasien leptospirosis dari sana," ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan ini mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan air atau tanah yang tercemar kencing tikus. Jaya juga men-

yarankan untuk merebus air dahulu sebelum diminum atau digunakan untuk mandi.

"Kami juga akan berkerja sama dengan dinas terkait untuk memberantas tikus yang terutama berada di perkampungan. Kami sudah berkordinasi ke Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu menangkap dan memeriksa tikus," ujarnya.

Kemudian, jika ada masyarakat yang mengalami gejala yang mengarah ke leptospirosis, segera periksan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

"Kasus ini jangan dianggap sepele, karena bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat," tutup Jaya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Renstra bertujuan untuk menjawab isu terkait kesehatan. (Istimewa)

Dinkes Kaltim Susun Renstra 2024-2026

SAMARINDA - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2024-2026, telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, dengan memperhatikan isu-isu strategis kesehatan dan perencanaan untuk pengarusutamaan gender.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan itu adalah terkait dokumen perencanaan untuk pengarusutamaan gender yang harus dimasukkan dalam domain perencanaan Dinkes Kaltim tahun 2024," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin, Kamis (5/10/2023).

Disebutkannya, beberapa dokumen Dinkes Kaltim memang ada beberapa yang masuk indikator nasional termasuk pengarusutamaan gender yang harus dilaksanakan sesuai undang-undang.

"Untuk pengarusutamaan gender, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melaksanakan rencana ini termasuk Dinkes Kaltim, karena dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan masuk dalam Rencana Pembangunan Umum Daerah (RPUMD), dan menjadi program setiap tahunnya," ujarnya.

Selain itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinkes Kaltim Agus Budianto menjelaskan tujuan penyusunan Renstra ini selain untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis di bidang kesehatan, juga menyusun Renstra Dinkes Kaltim yang terintegrasi dan responsif.

Beberapa isi strategis kesehatan, diantaranya penurunan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, perbaikan pengelolaan

jaminan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan. Hal itu untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

"Dalam menyusun Renstra, kita tidak hanya melakukan evaluasi program dan kegiatan yang sudah berjalan selama tahun 2019-2022, tetapi juga menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan mempertajam indikator dan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun yang akan datang," beber Agus.

Dalam penyusunan Renstra, melibatkan 24 peserta dari Dinkes Kaltim dan 12 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinkes Kaltim. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Nita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Pelatihan
PKMN tingkat-
kan kualitas
pelayanan ibu
dan bayi baru
lahir. (istimewa)

PELATIHAN PKMN BAGI NAKES, UPAYA TURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU & BAYI

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar pelatihan penanganan kegawatdaruratan bagi dokter umum, bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) primer bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

"AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan hasil survei penduduk antara sensus (SUPASI) 2015, AKI di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB adalah 24 per 1.000 kelahiran hidup," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Jumat (6/10/2023).

Menurut Jaya, salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi adalah komplikasi yang terjadi pada saat masa kehamilan, persalinan dan nifas.

Komplikasi tersebut dapat dicegah dan di-

tangani bila tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini, memberikan pertolongan pertama, melakukan tindakan stabilitas pasien, dan merujuk ke rumah sakit bila perlu.

"Untuk itu, kami mengadakan pelatihan PKMN yang komprehensif dan tepat sasaran bagi tenaga kesehatan di Fasyankes primer dari Kabupaten Berau," ujarnya.

Ditambahkan Jaya, pelatihan ini meliputi teori dan praktik tentang penggunaan partograf, manajemen aktif kala II, resusitasi neonatus, pencegahan infeksi, dan rujukan efektif.

Ia berharap pelatihan PKMN tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Berau.

"Kami mengapresiasi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kaltim dengan Balai Pengembangan Pendidikan Kesehatan (Bapelkes) Samarinda dalam penyelenggaraan pelatihan ini," pungkasnya. **(nit/adv/dinkes)**

Pewarta : Ernit

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr Jaya Muallimin. (Istimewa)

Dinkes Kaltim : Berikan Bayi ASI Eksklusif Guna Cegah Stunting

SAMARINDA- Pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif selama enam bulan pertama merupakan salah satu upaya dalam pencegahan bayi stunting. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Muallimin.

"ASI eksklusif artinya bayi hanya mendapatkan ASI tanpa tambahan susu atau makanan lain, termasuk susu kental manis yang tidak baik untuk kesehatan bayi," ungkap Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Ia juga menjelaskan, ASI sudah mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

"ASI mengandung protein, lemak, karbo-

hidrat, vitamin, mineral, dan zat untuk kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit," ujarnya.

Sehingga, Jaya mengajak para ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Selain itu, juga mengimbau para calon pengantin untuk mengikuti sekolah calon ibu. Karena para calon ibu akan mendapatkan ilmu tentang cara menyusui yang benar, manfaat ASI, dan cara mengatasi masalah dalam menyusui.

"ASI eksklusif adalah investasi masa depan bagi anak kita," tutup Jaya. **(nta/adv, Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
PJ GUBERNUR KALTIM



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



kucing peliharaan juga wajib melakukan vaksin untuk cegah penyakit zoonosis. (Istimewa)

BAHAYA PENYAKIT ZONOSIS, JAYA MEMINTA HEWAN PELIHARAAN DIVAKSIN

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersinergi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim melakukan vaksinasi rutin agar masyarakat terbebas dari penyakit zoonosis.

"Kami mengingatkan masyarakat agar mewaspadaai penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya," kata Kepala Dinkes Kaltim Jaya Muallimin, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing.

Sedangkan untuk penularan zoonosis, dapat menular melalui tiga cara yaitu langsung, tidak langsung, dan konsumsi.

"Beberapa penyakit zoonosis itu, yakni rabies, antraks, dan leptospirosis," ujarnya.

Dinkes Kaltim tengah mengencakan vaksinasi terhadap anjing liar dan hewan peliharaan lainnya, guna menjadikan wilayah tersebut bebas dari penyakit rabies.

"Kami pastikan anjing liar divaksin karena mereka berpotensi menularkan rabies kepada manusia," kata Jaya.

Kendati demikian, hewan peliharaan lainnya pun wajib divaksinasi termasuk kucing. Karena kucing jika terkena rabies juga bisa menyebabkan gejala yang sama dengan anjing. Dan hewan lainnya juga perlu mendapatkan vaksin adalah kera.

Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk segera membersihkan luka gigitan hewan dengan

air mengalir dan sabun.

"Jangan sampai virus rabies masuk ke dalam tubuh. Segera periksakan diri ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti rabies," ucapnya.

Jaya meminta masyarakat yang memiliki hewan peliharaan sebagai binatang kesayangan dan merawatnya dengan baik. Vaksin untuk hewan peliharaan disediakan secara gratis seperti yang dilakukan untuk sapi dan kerbau.

"Di Kaltim, ada penyakit zoonosis lain yang berasal dari sapi dan kerbau, yaitu anthrax. Kita sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk penyakit zoonosis," pungkasnya.

(Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

<http://dinkes.kaltimprov.go.id>



Dra. Sri Wahyuni M.PP
SEKDA PROV. KALTIM



Dr. Akmal Malik, M.Si
GOV. KALIMANTAN TIMUR



dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM



REMBUK STUNTING, TINGKATKAN SINERGITAS PROVINSI & KABUPATEN/KOTA



Kepala Dinas
Kesehatan
Kaltim Dr. Jaya
Muallimin. (Me-
dia Kaltim)

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rembuk stunting tingkat provinsi tahun 2023 untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting di wilayah setempat.

"Kami melakukan koordinasi dengan seluruh dinas terkait untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021," kata Jaya, di Hotel Mercure, Senin (9/10/2023).

Jaya mengatakan, dinas terkait dalam penanganan stunting yakni Dinas kesehatan Kaltim, Dinas pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan.

Ia menjelaskan, dalam rembuk stunting itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim. Dinas kesehatan Kaltim berlaku sebagai koordinator untuk Tim Pengendali Penyakit dan Penye-

hatan Lingkungan (TPPS) yang berkoordinasi dengan kepala daerah dari sepuluh kabupaten dan kota se-Kaltim.

Salah satu intervensinya adalah sensitif terhadap lingkungan, rumah sehat layak huni yang disana ada sanitasi yang baik, ketersediaan air yang menjadi urusan dari Dinas PUPR.

Kemudian, terkait keluarga yang harus dibantu melalui program keluarga harapan harus punya kartu BPJS yang menjadi urusan Dinas Sosial. Untuk pemberian makan bergizi, diupayakan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Kelautan.

"Selain itu ditekankan juga pentingnya kesadaran ibu menggunakan ASI eksklusif dan melaksanakan pola asuh yang baik bagi anaknya," ungkap Jaya.

Jaya pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DKP3A) bersama BKKBN, dengan program Sekolah Calon Pengantin, Sekolah Ibu Hamil, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

"Semua dinas terkait dirangkul dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kaltim dalam konvergensi penanganan program," ujarnya.

Kemudian, program intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kaltim, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan minimal empat kali bagi ibu hamil, pemberian vitamin A bagi anak-anak, dan pemberian makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan energi kalori atau MPASI.

"Ketika ibu melahirkan harus memberikan ASI selama 24 bulan kemudian imunisasi dasar lengkap bagi anak," imbuhnya.

Menurut Jaya, beberapa program intervensi spesifik lainnya terkait anak yakni melakukan timbang berat badan dan diukur tinggi badan serta dipantau setiap bulan dan dilaporkan di TPPS.

"Tadi sudah dilibatkan data yang terintegrasi bisa kita lihat sebulan sekali melalui data geospasial, kita bisa melihat bayi lokasinya dimana dan posyandunya apa," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



RAIH 5 MEDALI DI TOKYO, WABUP RENDI APRESIASI PRESTASI ATLET KUKAR



**Desa Batuah Terus Kembangkan
Ikon Dewi Belai**



Suasana pertandingan Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo International Study Session, di Tokyo, Jepang. (Istimewa)

RAIH 5 MEDALI DI TOKYO, WABUP RENDI APRESIASI PRESTASI ATLET KUKAR

TENGGARONG - Prestasi gemilang diperoleh Kontingen Shorinji Kempo Kutai Kartanegara (Kukar), yang membawa nama Indonesia dengan berhasil meraih 5 medali dalam Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo International Study Session, di Tokyo, Jepang. Yakni masing-masing dua medali emas, satu perak dan dua perunggu berhasil dikantongi atlet asal Kukar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang hadir langsung untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada para atlet Kukar yang berlaga di Tokyo, pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dirinya pun sangat bangga atlet asal Kukar bisa membawa nama harum panji Indonesia di kancah internasional.

Rendi menyampaikan bahwa Pemkab Kukar bakal memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang menorehkan prestasi di Jepang. Bahkan, dirinya pribadi juga ikut memberi penghargaan.

"Nanti kita kawal di anggaran 2024 dan penghargaan ini bisa disampaikan. Saya secara pribadi juga memberikan penghargaan untuk uang jajan, nanti dibagi rata saja," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persauda-

raan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kukar, Ahmad Zulfiansyah, pun bersyukur karena atlet Kukar berhasil menorehkan prestasi di kancah mancanegara. Ia menyebut ini menjadi buah dari hasil kerja keras atlet Shorinji Kempo Kukar selama berlatih di Kukar.

"Kita sudah berupaya maksimal, ini hal yang membanggakan dan harus disyukuri," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ada 33 atlet Shorinji Kempo Kukar yang berlaga di Jepang, didampingi lima official, dan enam pelatih. Rombongan dilepas Sekda Kukar, H Sunggono di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (3/10/2023) lalu.

Atlet yang mengikuti kejuaraan kempo di Tokyo, Jepang ini juga telah melewati beberapa tahapan-tahapan. Mereka yang berangkat ke Jepang telah lolos pada kualifikasi PON.

Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang peningkatan kualitas para atlet, akan ada sesi belajar selama tiga hari, diikuti pelatih dan para atlet untuk kemudian mengikuti ujian naik tingkat. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kawasan Wisata Dewi Belai yang berada di KM 30 Desa Batuah, Kukar. (Istimewa)

Desa Batuah Terus Kembangkan Ikon Dewi Belai

TENGGARONG - Memiliki tumbuhan dan buahan endemik, rupanya tidak disia-siakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar). Menjadikannya sektor pariwisata unggulan berbasis pertanian atau agrowisata. Yakni menciptakan Desa Wisata Benua Elai atau Dewi Belai.

Desa Batuah memang diketahui menjadi salah satu desa yang banyak mengembangkan potensi Buah Elai. Sebagian besar petani pun menggelutinya, baik dari sektor hulu sampai hilirisasinya. Terbukti, sejauh ini sudah ada 3 varietas unggulan Buah Elai yang sudah dikembangkan dan didaftarkan oleh Menteri Pertanian. Masing-masing Lai Batuah (2016), Lai Kutai (2017) dan Lai Mahakam (2009). Bahkan Lai Mahakam sudah dikenal cita rasanya di mancanegara.

Dewi Belai pun kini terus dikembangkan oleh Pemdes Batuah saat ini. Menjadikannya sebagai ikon pariwisata baru di Kukar secara umum, dan Desa Batuah secara khusus. Terlebih, Desa Batuah yang berada di segitiga emas Kalimantan Timur (Kaltim). Yakni Sa-

marinda, Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berharap dapat menarik kunjungan wisatawan, kelak saat IKN benar-benar beroperasi di Kaltim.

"Kalau konsep ini kita lakukan sama-sama, ada pihak swasta dan pemerintah maka kami menjamin program ini akan berjalan maksimal," ungkap Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid.

Rasyid melihat, pentingnya keberadaan dan kehadiran Pemkab dalam memberikan dukungan penuh. Mulai dari promosi, pembangunan infrastruktur, dan paling penting dalam kajian pengembangannya. Saat ini, Pemdes Batuah pun sedang mendorong dan mengejar pembangunan infrastruktur menuju lokasi wisata Dewi Belai, yakni di KM 30 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan.

"Bahwa lokasi-lokasi wisata yang ada di Desa Batuah, kami ingin infrastrukturnya bagus, salah satunya Dewi Belai ini, kita masukkan ke Musrenbang," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini. (Istimedia)

16.400 Nelayan di Kukar Dapat Program Penekanan Dampak Inflasi

TENGGARONG - Program pusat dalam menekan inflasi di daerah, turut menyasar sektor perikanan. Terutama yang berdampak langsung kepada nelayan dan pembudidaya ikan, salah satunya di Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni lebih kepada menyasar pemenuhan ongkos produksinya.

Dijelaskan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini, program penekanan inflasi lebih kepada penyaluran uang tunai untuk membeli bahan bakar untuk digunakan oleh para nelayan. Uang tunai tersebutlah yang digunakan untuk membeli BBM subsidi, bukan menambah subsidi BBM yang sudah ada.

"Kalau di pesisir itu bahan bakar solar tetapi nelayan di perairan darat itu yang

di sungai itu menggunakan pertalite. Dia akan gunakan uang itu untuk membeli bahan bakar tersebut," ungkap Husaini, Selasa (10/10/2023).

Total ada 16.400 nelayan dan pembudidaya yang sudah menerima program yang dirujuk dari pemerintah pusat tersebut, dengan menyasar 20 kecamatan di Kukar. Ia menambahkan bantuan senilai Rp 24,6 miliar tersebut, bahwa penyalurannya sudah sejak pertengahan September. Tahap pertama diberikan untuk Juli hingga September, sementara tahap kedua diberikan untuk bulan Oktober sampai Desember 2023.

"Berakhirnya nanti 6 bulan kemudian (dua tahap)," tutup Husaini. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid. (Istimewa)

Libatkan Perangkat Desa hingga RT, Kades Batuah Bentuk Tim Pencatatan Aset Desa

TENGGARONG - Tidak hanya melakukan peningkatan dalam hal keterbukaan informasi publik saja yang sedang dikejar oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah. Namun juga terus melakukan perbaikan dalam hal administrasi pencatatan aset desa.

Hal ini masih dianggap belum maksimal, dikhawatirkan akan ada aset-aset desa yang tercatat dengan baik.

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid, menjelaskan jika pencatatan aset bagian terpenting untuk mengamankan aset desa. Apalagi aset-aset tersebut diharapkan kedepannya akan menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Karena dikatakannya, aset banyak tidak tercatat dan tidak menghasilkan apa-apa bagi desa.

"Padahal, aset sangat memungkinkan untuk memberikan tambahan sumber keuangan dengan melalui PADes," ungkap Rasyid.

Tak hanya berpotensi menambah pun-di-pundi PADes saja, pencatatan dianggap

penting untuk dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan desa kedepannya. Contoh kecil saja, aset desa berupa jalan usaha tani jika tidak tercatat dengan baik, maka desa sulit untuk melanjutkan proses pembangunannya.

"Saya ingin di masa kepemimpinan saya, semuanya aset bisa terdata, sehingga akan memudahkan pemerintah melanjutkan pembangunan," lanjutnya.

Maka dari itu, ia pun akan segera membentuk tim percepatan pencatatan aset desa. Isinya ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun (kadus) dan ketua Rukun Tetangga (RT) akan merampungkan pencatatan aset, sehingga desa akan bisa mengontrol keberadaan aset.

"Kalau semua sudah tercatat, nanti akan diambil titik koordinat dan akan dimasukkan di peta desa, sehingga akan mudah dikontrol melalui website desa," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid. (Istimewa)

Kunjungi Bandung, Desa Batuah Lakukan Orientasi Lapangan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

TENGGARONG - Keterbukaan informasi publik, rupanya menjadi salah satu fokus yang ingin ditingkatkan oleh Abdul Rasyid, Kepala Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar). Ini pun tampak diseriusi olehnya, dengan melakukan orientasi lapangan langsung ke Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Dipilihnya Desa Cibiru Wetan, lantaran desa tersebut berhasil menjadi nomor satu di tingkat nasional, sebagai nominator desa anti korupsi dan penerapan keterbukaan informasi publik. Hal inilah yang menarik Rasyid, untuk bisa diambil ilmunya dan diterapkan oleh perangkat Desa Batuah.

"Kalau ada program yang bagus dan sesuai karakteristik di Desa Batuah, tentu bisa kita tiru, sehingga program yang kita laksanakan bisa lebih baik," ungkap Rasyid.

Tak sekadar hanya orientasi lapangan ke Desa Cibiru Wetan saja. Hal konkret pun langsung dikerjakan, salah satunya dengan rapat khusus untuk meninjau kembali hasil kunjungan. Melihat apa saja yang bisa diterapkan di Desa Batuah. Diharapkan bisa melebihi pencapaian desa yang berpenduduk 17 ribuan orang tersebut.

Ia pun berharap, rombongan Desa Batuah yang terdiri dari perwakilan Kecamatan Loa Janan, ketua TP PKK Desa Batuah, ketua BPD Desa Batuah, anggota DPRD Kukar, dan perangkat desa lainnya ini, mampu memberikan warna baru. Tentunya untuk kemajuan Desa Batuah.

"Kalau kita tidak bisa lebih baik dari Desa Cibiru Wetan, minimal kita bisa mengikuti jejaknya," tutup Rasyid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



REM BLONG, TRUK BOX HANTAM 1 MOBIL DAN MOTOR DI PERTIGAAN JALAN TEMBUS

BACA HALAMAN A2

**PERLUAS WAWASAN LITERASI LEWAT
PERPUSTAKAAN DIGITAL KALTIM**





Kondisi terkini di lokasi TKP. (Syakurah/Radarbontang)

Rem Blong, Truk Box Hantam 1 Mobil dan Motor di Pertigaan Jalan Tembus

BONTANG - Terjadi kecelakaan di Pertigaan Lampu Merah Jalan Tembus yang melibatkan 1 kendaraan roda 4, 1 sepeda motor, dan satu truk box pengangkut barang retail, Rabu (11/10/23) sekira pukul 08.50 wita.

Menurut Abdullah saksi mata menjelaskan, bahwa truk retail tersebut gagal menaiki tanjakan lampu merah, sehingga saat truk tersebut mundur menghantam satu mobil roda 4 milik salah satu perusahaan, dan menyeret satu motor.

"Pengendara motor pas liat kejadian itu langsung lari ninggalin motornya, jadi motor ikut keseret truk, sampai masuk parit," bebernya.

Salahsatu anggota Satpolantas Bontang, Bambang menjelaskan hal yang sama. Menurut penjelasan supir truk, truk yang dikendarainya tersebut mengalami rem blong, dan menghantam kendaraan lain.

"Supir mengatakan kalau dia bawa



truk temannya, jadi dia tidak tahu kalau ada rem blong," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, langkah selanjutnya supir

akan dibawa ke Mako Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan.

Penulis: Syakurah

Editor: Yusva Alam



Ilustrasi Atlet prestasi Bontang. (ist)

Atlet Prestasi Kurang Diperhatikan, Pemkot Diminta Buka Peluang Kerja

BONTANG - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta Pemkot Bontang memperhatikan dunia olahraga di Bontang. Lantaran banyak atlet berprestasi masih kurang mendapat perhatian serius.

Diungkapkan Faiz, banyaknya pencapaian yang diraih para atlet berprestasi di Bontang sering luput dari perhatian pemerintah daerah.

Salah satunya dicontohkan cabang olahraga (Cabor) pencak silat yang bahkan bisa mewakili dan mengharumkan nama Kota Bontang juga Kalimantan Timur di tingkat nasional. Namun mereka justru kesulitan saat mencari kerja di kotanya (Bontang) sendiri.

"Harusnya para atlet-atlet berprestasi ini bisa mendapat peluang kerja Misalnya, diangkat menjadi pegawai TKD dilingkup Pemkot Bontang, atau diangkat menjadi Pegawai Pemerin-

tah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur atlet berprestasi," ujarnya.

Tidak hanya bonus, pemberian peluang kerja ini juga diperlukan sebagai jaminan masa depan para atlet. Maka itu diperlukan perhatian pemerintah dalam menjalin komunikasi yang baik utamanya bagi semua cabor.

"Hal ini memang perlu disuarakan, agar para atlet juga merasa diperhatikan sama pemerintah. Tak hanya sekedar bonus prestasi, tapi ada jaminan bagi mereka (atlet) ini di masa depannya," timpalnya.

Politikus Partai Golkar ini pun ke depan berencana bakal memanggil para atlet berprestasi di Kota Bontang, untuk mendengar apa yang menjadi keinginan mereka kepada pemerintah.

"Kami (DPRD) akan mengakomodir hal-hal yang disampaikan para atlet-atlet berprestasi ini," pungkasnya. (al/adv)



Andi Faizal Sofyan Hasdam saat dilantik jadi Ketua IPSI beberapa waktu lalu. (ist)

IPSI Bontang Angkat Andi Faiz Jadi Ketua Periode 2023-2027

BONTANG – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) resmi mengangkat Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam sebagai Ketua IPSI Bontang Periode 2023-2027.

Dihadiri ratusan atlet pencak silat dari 10 perguruan pencak silat di Bontang, Andi Faiz resmi dikukuhkan dan diambil sumpahnya, bersama jajaran pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Bontang Periode 2023-2027, di Gedung Disporapar.

Dalam Sambutannya, Andi Faiz mengatakan, sebelum pengukuhan telah digelar beberapa kegiatan dan dilakukan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama ketua dan pengurus dari 10 perguruan pencak silat yang dihadiri sebanyak 7.770 warga pencak silat di Kota Bontang. Pada deklarasi kesepakatan tersebut, ada 2 point penting yang harus ditanamkan dengan baik.

"Pertama kita harus tunduk dan patuh pada peraturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPSI. Kedua kita harus menciptakan kerukunan dan ketertiban, untuk membawa kebaikan dan kemakmuran di Kota Bontang," ujarnya.

Tak lupa Andi Faiz juga turut mengucapkan terimakasih atas amanah dan kepercayaan yang diber-

ikan kepadanya dan berharap bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik.

"Menjadi Ketua IPSI ke depan, menjadi sebuah proses yang panjang, tentunya akan penuh dinamika. Kenapa saya ingin menjadi Ketua IPSI, karena saya melihat ada 2 aspek di IPSI, pertama prestasi dan sisi sumber daya manusianya," timpalnya.

Selain itu, dikatakan Andi Faiz bahwa IPSI memiliki sisi prestasi yang harus didukung dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan bagaimana meningkatkan fasilitas sarana prasarannya. Hal ini pun menjadi tantangan bagi dirinya sebagai Ketua IPSI Kota Bontang, bagaimana menciptakan atlet berprestasi yang lahir dari Kota Bontang untuk mewakili Kalimantan Timur.

"Makanya saya mencari tahu apa saja kekurangan-kekurangan di Kota Bontang terkait dengan pencak silat ini," terangnya.

Di antara perguruan silat yang hadir adalah; Persaudaraan Setia Hati Terate, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pencak Silat Cempaka Putih, Pencak Silat Joko Tole, Persinas Asad, IKSPI Kera Sakti, Naga Pertapa, Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Winongo. (al/adv)



Ilustrasi lapak pasar. (ist)

Pedagang Keluhkan Mahalnya Biaya Take Over Lapak di Pasar

BONTANG – Para pedagang di pasar tradisional mengeluhkan soal mahalnya biaya balik nama (take over) lapak di dalam pasar. Alhasil banyak pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono beberapa waktu lalu. Dirinya kerap mendapat keluhan dari pedagang terkait take over lapak.

“Kata pedagang harga balik nama lapak kosong yang mau ditempati pedagang lain, biayanya terlalu tinggi. Sampai-sampai ada yang Rp 10 juta,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disperindagkop-UKM Kota Bontang, Kamilan menjelaskan, bahwa lapak atau kios yang ada di pasar itu sifatnya adalah hak guna. Bukan atas nama pribadi sehingga tidak bisa diperjualbelikan,

sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang yang berlaku.

Adapun para pedagang yang bertempat di pasar seperti di Taman Rawa Indah hanya membayar retribusi sewa ruang sebulan sekali, dengan tarif sewa ruang berkisar Rp 6.750 - Rp 54.000 tergantung luas lapak pedagang.

“Tarif lapak-lapak di pasar itu sudah diatur sesuai Raperda,” terangnya.

Meski demikian Kamilan berjanji akan menindaklanjuti dan mengevaluasi persoalan tersebut, untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan lapak tersebut.

“Saya tidak tahu kalau itu ada oknum. Makanya kami akan lihat dan evaluasi lagi. Kalau melanggar Perda akan segera kami tindaklanjuti,” tegasnya. (al/adv)

AYO IKUTI!!
LOMBA VIDEO PENDEK

TEMA
PERAN PUPR
MENDUKUNG INFRASTRUKTUR
DESTINASI WISATA

Dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang yang ke-24 dan mensukseskan Bontang Festival 77 Event. Dengan semangat "Energy of Bontang #sinergyandcollaboration". Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan Lomba Video. Lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman Tertib Bersih Sejuk Indah Ramah Kenangan).

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi)
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)

DAFTAR SEGERA

NARAHUBUNG / CP :
Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/vCaP8biUjtdAYkHH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah ditombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.

Foto: Iklan lomba video pendek Dinas PUPRK.

Jelang Penentuan Juara, Berikut 7 Nominator Lomba Video Pendek Dinas PUPRK!

BONTANG – Lomba video pendek garapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memasuki tahap detik-detik penentuan juara. Sebanyak 7 nominator berhasil lolos ke babak akhir, untuk dipilih karya yang akan menjadi pemenangnya.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPRK, Usman melalui Sekretaris, Iskandar selama lomba berlangsung terdapat 25 tim yang mengikuti lomba yang dimulai sejak tanggal 30 September 2023 tersebut. Dari 25 tim tersebut yang telah menyerahkan karya video untuk dinilai tim juri sebanyak 16 karya video.

"Usai penilaian dari tim juri, ke-25 tim tersebut mengerucut menjadi 7 tim yang berhasil masuk nominasi,"

jelasnya.

7 nominator tersebut di antaranya:

1. Asli Bontang
2. Visit Bontang
- 3 V Project
4. Penden
5. Fantastic Four
6. LNG
7. DIBOND

"Tanggal 12 Oktober 2023 pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara live dibacakan di acara gala dinner HUT Kota Bontang ke-24 di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang," beber Iskandar.

Diberitakan sebelumnya Dinas PUPR Bontang mengadakan lomba video pendek. Event ini diadakan dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang ke-24, dan mensukseskan

Bontang Festival 77 event.

Lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang, untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman, Tertib, Sejuk, Indah, Ramah Kenangan).

"Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan lomba video ini dengan semangat "energy of Bontang," tegasnya.

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 30 September 2023. Para peserta diajak spot hunting di 3 lokasi mulai pukul 06.00 Wita. Spot hunting di antaranya:

Karang Pasilan (Snorkling), Kampung Malahing, Pulau Beras Basah, dan Pulau Segajah (additional).

Penulis/Editor: Yusva Alam



Temuan Ikan mati. (ist)

Warga Guntung Temukan Ikan-Ikan Mati, Diduga Tercemar Limbah

BONTANG - Warga di Kelurahan Guntung mendapati banyaknya temuan ikan mati di perairan sekitar wilayah Guntung pada Senin (9/10/23) malam.

Saat dikonfirmasi, Lurah Guntung, Denny Febrian menjelaskan, bahwa ikan-ikan tersebut tidak hanya didapat di Sungai Guntung, melainkan sepanjang muara hingga ke Pelabuhan Kelurahan Loktuan.

"Didapatnya mulai dari muara di Sungai Guntung sampai ke pelabuhan sana, dan lumayan banyak yang mati, kami mendapatkan laporan tersebut juga dari warga," jelasnya saat dihubungi Selasa (10/10/23) oleh Redaksi Radarbontang.com.

Lebih lanjut, pihak kelurahan telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait, agar dilakukan pengambilan sample air dan sample ikan yang ditemukan sudah

mengambang di atas air.

"Kami koordinasi dengan dinas lingkungan hidup, dan baru akan dilakukan penelitian terkait penyebab kematian ikan tersebut," ujarnya.

Sampai saat ini belum dapat dijelaskan penyebabnya. Namun Denny sempat berdiskusi dengan seseorang yang bekerja di bidang perikanan. Dijelaskannya, terdapat dua kemungkinan penyebab kematian ikan tersebut, yakni perubahan cuaca ekstrim ataupun pencemaran oleh limbah.

"Kami belum tau penyebab pastinya, tapi pengambilan sample akan dilakukan sesegera mungkin, karena tidak mungkin untuk dibiarkan berlama-lama. Untuk limbah sebenarnya belum pernah terjadi," pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Penari Jepen pemantapan gerakan di Lang-Lang. (Syakurah/Radarbontang)

Penari Jepen Pemantapan di Lang-Lang, Paduan Suara BoChiCho Ramaikan HUT Bontang

BONTANG - Sebanyak 37 sekolah negeri dan swasta terlibat dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bontang dalam menampilkan Tari Jepen massal. Sekira 2 ribu penari Jepen berasal dari pelajar SMP, SMA dan SMK Bontang akan meramaikan perayaan HUT ke-24 Kota Bontang pada 12 Oktober mendatang.

Kasi Kebudayaan Disdikbud Bontang, Nur Irwansyah menjelaskan, konsep Tari Jepen kali ini sedikit berbeda dari tahun lalu. Dimana tahun lalu mengenakan selendang berwarna hijau dan merah, tahun ini menggunakan selendang berwarna oranye. Baik penari Jepen putra

maupun putri.

Nantinya, ribuan penari Jepen bakal mengenakan udeng. Untuk putra mengenakan udeng khas Kota Bontang, sedangkan untuk putri mengenakan udeng berbentuk segitiga.

"Ini sebagai bentuk promosi produk lokal. Agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, tapi nanti akan dikembalikan. Karena jadi inventarisasi Disdikbud," jelasnya, Selasa (10/10/2023).

Selanjutnya, ribuan penari Jepen akan memantapkan gerakan di Lapangan Lang-Lang, usai berlatih secara mandiri selama tiga bulan di masing-masing sekolah, yang didampingi oleh Sanggar

Tari Sekar Arum.

"Sampai besok mereka latihan di Lapangan Lang-Lang. Biar penampilan di hari H nanti berjalan maksimal," ujarnya.

Ditambahkan Kadisdikbud Bontang, Bambang, bahwa akan ada tambahan penampilan dari Bontang City Choir (Bo-CiCho) yang baru saja memenangkan gold medal kategori koreo terbaik di event lembah strait internasional Bitung choir festival 2023.

"Tiga hari lalu mereka mendapatkan juara tersebut dan akan tampil lagi di HUT Kota Bontang," tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Tiga pengedar narkoba berhasil dibekuk polisi. (ist)

Keponakan dan Tante Terlibat Peredar Narkoba

BONTANG - Jaringan peredaran gelap narkoba kembali dibongkar kepolisian. Sebanyak 3 pengedar narkoba dibekuk, Senin 9 Oktober 2023.

Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasitiya melalui Kasat Resnarkoba Iptu M Yazid mengatakan, bahwa ketiganya merupakan pengedar.

Pertama kali polisi menangkap seorang Warga Loktuan berinisial MKA 23 tahun pada Senin (9/10/2023) pukul 14.00.

Setelah digeledah ditemukan satu bungkus rokok berisi 1 poket sabu, dan 1 poket di dalam mouse komputer yang terletak di dalam kamar.

"Katanya dapat sabu dari seorang wanita," jelas mengutip dari Polresbontang.com.

Sabu itu diambil dengan sistem jejak. Tersangka baru akan mendapat upah, setelah sabu tersebut laku terjual.

Sebelum menangkap wanita tersebut, polisi terlebih dulu meringkus pria berinisial ACP (21) Warga Jalan KS Tubun, Kelurahan Api-API,

Bontang Utara.

Dia ditangkap saat baru pulang mengantar EPS membesuk suaminya di Lapas Bontang. EPS merupakan tante tersangka ACP, yang juga pemasok sabu bagi MKA.

Dia ditangkap saat duduk di atas motor. Ditemukan 1 poket sabu seberat 0,53 gram di kantong celana sebelah kanan dan uang hasil penjualan sabu Rp 150 ribu.

"Sabunya ya dari tantenya, perempuan itu," katanya.

Di hari yang sama polisi akhirnya berhasil menangkap wanita berinisial EPS (40) Warga Loktuan yang berdomisili di Kelurahan Satimpo, Bontang Selatan.

Saat digeledah ditemukan 5 poket sabu seberat 3,66 gram di dalam kamarnya. Beserta alat hisap, timbangan digital, dan sedotan runcing.

Mereka dijerat pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Editor. Yusva Alam



HM SYAFRANUDDIN
Kepala Dinas Perpustakaan
& Kearsipan (DPK) Kaltim

RADAR BONTANG
AKTUAL & TERPERCAYA .COM

KORAN DIGITAL



DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALIMANTAN TIMUR

EDISI MINGGU KE 1 - OKTOBER 2023



**PERLUAS WAWASAN LITERASI
LEWAT PERPUSTAKAAN
DIGITAL IKALTIM**



ARSIP BERUSIA LEBIH DARI 10 TAHUN, DIMUSNAHKAN



Pemusna-
han arsip
menggu-
nakan
mesin
pencacah
arsip

SAMARINDA - Arsip yang telah melampaui batas usia ideal yakni 10 tahun harus dimusnahkan. Hal ini berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Atas dasar tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim melakukan pemusnahan Arsip Ex Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim kurun waktu Tahun 2007 sekaligus penyerahan arsip statis kepada DPKD Kaltim, yang dilaksanakan pada Selasa (3/10/2023) bertempat di Aula Kantor BPKAD Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kota.

Pemusnahan arsip tersebut, dihadiri langsung oleh Arsiparis Alih Media Ketua Tim Akuisisi Kementerian Lembaga Perpindahan Ibukota Negara, Drs. Tato Purjianto, Asisten Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ir. Riza Indra Riadi, M.Si., Plh DPKD Kaltim Taufick S.Sos,M.Si Dan Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E,MM.

Kepala BPKAD Kaltim, Fahmi Prima Laksana, S.E,MM dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyebutkan bahwa di

lembaganya terdapat 9.425 berkas arsip statis, 85 berkas arsip akan diserahkan dan disimpan DPKD Kaltim, dan data lainnya 2.236 arsip disimpan BPKAD berstatus inaktif dan 6.707 arsip disetujui untuk dimusnahkan.

"6.707 arsip telah disetujui dimusnahkan, saya sangat apresiasi pejuang arsip BPKAD. Sejak 2015, BPKAD sudah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 5 kali. Semoga semangat menjaga dan merawat arsip ini dapat menjadi inspirasi bagi SKPD lainnya dalam upaya tertib pengelolaan arsip," papar Fahmi.

Fahmi melanjutkan, BPKAD menjadi SKPD yang dinilai baik dalam pengelolaan arsip setelah Universitas Indonesia. Namun, bukan hanya dari segi prestasi yang harus ditiru akan tetapi komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan yang menjadi harapan Fahmi kepada seluruh OPD di Kaltim.

"Bukan hanya prestasi, Yang paling penting adalah komitmen dalam menjaga arsip terkelola secara berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, S.Sos,M.Si, memberikan apresiasi kepada DPKAD atas dedikasinya dalam menjaga pengelolaan arsip dengan tertib.

Taupik menyebutkan saat ini

baru terisi 25 persen penyimpanan arsip OPD di Depo Arsip DPK Kaltim. Ia berharap 75 persen dari ruang penyimpanan Depo Arsip turut dapat diisi oleh berkas OPD lainnya.

"DPKD Kaltim menjadi pilot project untuk OPD lain dalam menerapkan sistem penataan arsip. Mohon partisipasinya secara professional kepada masing-masing OPD. Arsip yang dikelola dengan baik akan mempunyai nilai yang sangat vital dan penting," jelas Taufik kepada para audiens yang hadir.

Usai sambutan agenda kemudian dilanjutkan dengan proses pemusnahan arsip melalui mesin pencacah arsip oleh Plh Kepala DPK Kaltim, Kepala BPKAD Kaltim, dan perwakilan ANRI. Ditutup dengan penyerahan arsip statis secara simbolis oleh BPKAD kepada DPK Kaltim.

Diketahui, Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PENGARSIPAN ARSIP STATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH SANGAT PENTING



Arsiparis Ahli
Muda DPKD
Kaltim Dewi
Susanti MM

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan terus mengupayakan terciptanya tertib arsip di lingkungan Pemprov Kaltim, salah satunya adalah menampung arsip statis.

Arsiparis Ahli Muda DPKD Kaltim, Dewi Susanti menjelaskan Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yakni Organisasi Perangkat Daerah. Karena, masih memiliki nilai guna kesejarahan, walaupun telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau lembaga kearsipan.

Berdasarkan UU RI pasal 18 No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, diamanatkan bahwa setiap unit pencipta arsip memiliki tugas melakukan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan dalam hal ini adalah DPKD Kaltim.

"Penyerahan arsip tersebut merupakan upaya pengamanan dan pelestarian arsip statis yang memiliki nilai guna sejarah, bukti keberadaan (evidential), informasional (informational), dan intrinsik (intrinsic) DPKD Kaltim," ungkap Dewi

Pada umumnya, arsip statis sudah berakhir nilai gunanya sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja bagi

unit pencipta arsip namun masih memiliki kegunaan yang lebih luas untuk kepentingan umum sebagai sumber informasi, bahan penelitian dan pembelajaran, atau nilai sejarah.

"Dari arsip kita akan bercerita soal kita dulunya Kaltim dan Kaltara itu satu provinsi, juga sejarah soal otonomi daerah dulu kita belum otonomi sekarang sudah otonomi, atau yang sekarang sejarah soal penetapan IKN, generasi mendatang pasti bertanya catatan sejarah soal penetapan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara, yang dulunya ibu kota Indonesia di Jakarta dan sekarang di Kalimantan Timur," jelasnya.

Pentingnya pengarsipan oleh penyelenggaraan pengarsipan adalah untuk merawat dan melestarikan arsip, sebagai alat bukti jika terkendala hukum juga sebagai pacuan tolak ukur pedoman kinerja selanjutnya.

"Misalkan ada yang terkendala hukum maka arsip-arsip ini bisa jadi bukti, terus bisa juga dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang ingin peningkatan target tahun mendatang, otomatis kita melihat kilas kinerja tahun lalu," ujarnya.

Selain itu juga arsip sebagai sumber bahan penelitian, seperti lembaga mahasiswa, pendidikan lembaga sejarah, Sebagai memori kolektif bangsa sumber sejarah baik itu untuk generasi sekarang juga untuk

generasi mendatang.

Lembaga - lembaga yang rajin setiap tahunnya menyerahkan arsip kepada DPKD Kaltim adalah BP-KAD, Bappeda, Dinas Perkebunan, dan Bagian Umum Pemprov Kaltim yang membawahi sembilan biro.

"Jadi ada yang sudah dan ada pula yang masih bertahap mengirim arsip statusnya" katanya.

Dia berharap kepada lembaga perangkat daerah lainnya untuk memanfaatkan tempat arsipnya agar lebih memudahkan pengarsipan.

Bahkan saat ini Pemprov Kaltim sudah mengeluarkan surat tentang penataan arsip Sekretaris Daerah Kaltim no 005/131726/DPK/V/31 Agustus 2023 mengatakan bahwa penataan pengelolaan arsip di semua perangkat daerah Kaltim, pengelolaan arsip dinamis statis pencipta arsip semua pemerintah di Kalimantan timur, arsip statis yang memiliki nilai guna wajib diserahkan, disimpan dan dilestarikan ke lembaga kearsipan Kalimantan Timur.

"Kita ingin mewujudkan sadar gerakan arsip disemua unit kerja, kiranya nanti setiap lembaga perangkat daerah Kaltim untuk melakukan koordinasi pengelolaan arsipnya ke DPKD Kaltim, kami tunggu," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor :Nicha Ratnasari



Pustakawan
Ahli Muda
Winda
Fitri Yantie.

PERLUAS WAWASAN LITERASI LEWAT PERPUSTAKAAN DIGITAL IKALTIM

SAMARINDA - Siapa yang sudah tahu? Ternyata Dinas Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini memiliki perpustakaan digital namanya iKaltim, sebagai sarana untuk mencari buku dalam bentuk digital atau ebook bagi yang tidak sempat ke Perpustakaan Kaltim.

Pustakawan Ahli Muda DPKD Kaltim Winda Fitri Yantie mengatakan, aplikasi iKaltim merupakan aplikasi perpustakaan digital yang bisa didownload di Playstore. Di dalam aplikasi tersebut tersedia ribuan ebook yang bisa dibaca di dalamnya.

"Jadi kalau nggak sempat ke Perpustakaan, bisa mencari buku bacaan atau referensi di iKaltim. Syaratnya mudah, kita untuk masuk cukup mendaftar secara online menggunakan email dan FB," kata yang sering disapa Yantie ini.

Setiap ebook yang tersedia di iKaltim tidak bisa di download, hanya bisa dibaca dan berjang-

ka waktu. Ini untuk menjaga hak cipta pemilik buku, agar tidak sembarangan orang bisa mengambil bukunya.

"Kita menjaga hak cipta, jadi nggak bisa sembarangan di download, dan jangka waktunya juga sekitar 1 minggu sudah hilang, Jadi perlu membuka dari awal kembali jika ingin meneruskan membaca " ungkapnya.

Dia menyebutkan banyak yang merasa terbantu dengan hadirnya iKaltim ini, karena sangat memberikan kemudahan para pembaca jika ingin mencari sebuah referensi.

"Bahkan ada dosen berkata dengan saya, dengan adanya iKaltim ini sangat membantu sekali mencari buku bacaan dan nggak harus beli karena bisa dibaca secara gratis. Kurikulum Merdeka itu kan para pengajar diminta mencari referensi sendiri, nah dari iKaltim mereka merasa terbantu nggak harus ke sana ke mari cari referensi," ujarnya.

Yantie pun berharap semua

lapisan masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah secara gratis ini. Dengan harapan agar bisa menambah wawasan dan inspirasi baru dari ebook yang ada di iKaltim.

"Jadi kita setiap tahun terus mensosialisasikan iKaltim, agar bisa dimanfaatkan, Karena nggak perlu datang, walaupun kita berada jauh bisa membaca dari perpustakaan digital ini, karena ribuan Ebook ini banyak berkaitan dengan pertanian, perkebunan, ekonomi, biologi, politik dan buku-buku referensi lainnya," tutupnya.

Diketahui, aplikasi iKaltim atau perpustakaan digital ini telah dicanangkan oleh Gubernur Kaltim sejak 2016 silam. iKaltim diciptakan sebagai sarana online bagi masyarakat yang membutuhkan buku bacaan jika tidak sempat untuk berkunjung ke Perpustakaan. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratmasati



Pustakawan
Ahli Muda
Patimah Irni
SPd MSI

DPKD KALTIM SIAP KERJA SAMA KEMBANGKAN BUDAYA & PELESTARIAN NASKAH KUNO

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan berkeliling pulau Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama. Hal ini merupakan hasil kesepakatan dari Rapat Koordinasi Pengembangan Center of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno, yang sebelumnya telah dilaksanakan di Taman Pintar Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Juli 2023 lalu.

Keliling Kalimantan ini dalam rangka mengunjungi DPKD yang belum menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DPKD Kaltim. Sejauh ini yang telah bertanda tangan baru DPKD Kaltara, sisanya adalah Kalsel, Kalteng dan Kalbar.

"Waktu kita rakor, semua perwakilan dari 5 provinsi di Kalimantan itu setuju adanya kerja sama kebudayaan. Tapi waktu itu cuma dihadiri oleh kabit-kabitnya saja. Oleh sebab itu kami yang akan berkunjung ke dinas perpustakaan yang ada di Kalsel, Kalteng dan Kalbar," ungkap Pustakawan Ahli Muda Patimah Irni saat ditemui Mediakaltim.com di ruang kerjanya Senin (2/10/2023) lalu.

Pihak DPKD Kaltim sudah melaku-

kan rapat internal untuk penentuan kapan akan berangkat keliling ke tiga provinsi tersebut.

"Kita target sih bulan Oktober ini jadwal sudah siap, tapi paling tidak November sudah selesai semua PKS ini," tegasnya. Dengan ditanda tangannya PKS tersebut nantinya, kerja sama antar provinsi se-Kalimantan untuk melestarikan Budaya dan naskah kuno bisa dijalankan.

Kerja sama ini penting karena mengacu pada Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 78a tahun 2011 hanya ada enam Badan Perpustakaan Provinsi yang ditetapkan menjadi Center of Excellent, dan Kaltim salah satunya.

Penunjukkan Kaltim sebagai Center of Excellent sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga sekarang belum ada perkembangan kegiatan atas program yang harus dijalankan.

Daerah yang ditunjuk sebagai Center of Excellent sendiri memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan pemustaka terhadap informasi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya dan etnis di Kalimantan.

Selain itu, Irni mengatakan DPKD

Kaltim telah mengembangkan website Pustaka Borneo yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengenalkan semua kultur budaya yang ada di Kalimantan.

"Jadi kita juga sudah sosialisasikan Web Pustaka Borneo, semua konten budaya yang ada di Kalimantan bisa kita muat disana, nanti semua konten budaya yang diajukan dari seluruh Kalimantan, sebelum di upload pastinya akan berkoordinasi dengan kami di sini terlebih dahulu sebagai pengelola website Pustaka Borneo," ujarnya.

Karena pentingnya sejarah, budaya dan kultur Kalimantan untuk dikembangkan, maka DPKD Kaltim berharap hal ini didukung oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat agar kebudayaan Kalimantan bisa terjaga.

"Tentunya kami juga membutuhkan dukungan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintahan, terutama kalo bisa Anggota DPRD Kaltim pun harus mendukung, agar lebih mudahnya dalam pengembangan kebudayaan, sejarah dan pelestarian naskah-naskah kuno ini," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



RDP DENGAN DISDIK, KOMISI I MINTA MAKSIMALKAN PEMENUHAN SARPRAS



TOLAK TEGAS PENGHAPUSAN PTT



Suasana RDP Komisi I DPRD Berau dengan Dinas Pendidikan Berau.

RDP DENGAN DISDIK, KOMISI I MINTA MAKSIMALKAN PEMENUHAN SARPRAS

TANJUNG REDEB - Komisi I DPRD Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Berau terkait Rancangan APBD tahun anggaran 2024 mendatang.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong didampingi jajaran Anggota Komisi I DPRD di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Senin (9/10/2023).

Peri mengatakan, pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasana (Sapras) sekolah yang ada di Kabupaten Berau harus menjadi prioritas.

"Dunia pendidikan itu kan yang paling penting ruang kelas, rumah dinas guru, laboratorium dan fasilitas lainnya. Saya kira ini yang kita penuhi dulu," jelasnya.

Dirinya menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tengah APBD Kabupaten Berau yang tinggi, harus benar benar mempertimbangkan anggaran yang diajukan guna menyejahterakan pembangunan dan pemenuhan fasilitas yang ada.

"Yang kami inginkan ini, berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan fisik sekolah untuk saat ini, sehingga ditahun depan bisa di anggarakan," ujarnya.

Terkait penganggaran APBD tahun anggaran 2024 mendatang, dikhawatirkan bisa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Sebab, kata dia, tidak ada jaminan bahwa anggaran yang diterima tetap sama atau meningkat. "Mumpung APBD kita saat ini masih tinggi. Tidak ada jaminan kedepan, anggaran tetap begini terus. Bisa saja menurun lagi," tuturnya.

Politikus Gerindra ini menyebut, Komisi I DPRD Berau, akan mendorong setiap program yang diajukan oleh pihak Disdik baik pemenuhan Sapras, Fasilitas maupun penunjang lainnya.

"Kami siap untuk membantu supaya tercapai target yang ada karena memang ini program pokok yang harus dilaksanakan. Bahkan, hal ini amanat langsung dari Undang-Undang," pungkasnya. (adv/set)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TINDAK DENGAN TEGAS PERUSAHAAN TAK TAAT ATURAN

TANJUNG REDEB – Adanya kasus mengenai perusahaan yang tak memenuhi hak karyawannya disoroti Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengambil tindakan tegas.

Dirinya mengaku beberapa pekan terakhir menerima kabar banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak maryawan.

"Saya sempat mendengar adanya beberapa perusahaan yang sempat bermasalah terkait dengan gaji karyawan," jelasnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi persoalan tersebut. "Artinya dalam satu bulan itu satu per satu masalah diselesaikan. Dan untuk masalah perusahaan saya meminta bupati untuk bisa membuat regulasi terkait permasalahan ini,"

tuturnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta kepada OPD terkait untuk lebih tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

"Berikan sanksi yang sesuai dengan aturan. Jangan sampai pemerintah dipermainkan mereka. Maka dari itu, saya tekankan agar selalu tegas mengatasi permasalahan ini, apalagi hal serupa juga tidak sekali dua kali terjadi," katanya.

Bagi perusahaan, Madri meminta agar bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jangan sampai ada hak-hak karyawan yang tidak dipenuhi.

"Saya tegaskan juga kepada seluruh perusahaan untuk mengikuti regulasi yang ada. Saya harap perusahaan jangan menahan atau tidak mengeluarkan hak-hak para karyawan yang sudah bekerja," tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

APRESIASI PELUNCURAN KAMUS BAHASA BANUA

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina menyambut baik peluncuran kamus Bahasa Berau atau Bahasa Banua yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau.

Ia menuturkan, dengan terbitnya kamus tersebut menjadi salah satu upaya untuk merawat dan menjaga bahasa daerah di Kabupaten Berau.

"Itulah yang kita harapkan sebenarnya," tuturnya.

Ia juga berharap kepada Organisa-

si Perangkat daerah (OPD) terkait agar Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Berau tentang perlindungan, pelestarian dan kebudayaan Berau hendaknya ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati (Perbup).

"Dalam hal ini Dispusip, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau untuk segera membuat draf Perbup-nya. Kita juga terus mendorong agar peraturan ini bisa maksimal diterapkan," pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

MINTA FASILITAS AIR BERSIH DI SEGAH DIPERHATIKAN MAKSIMAL

TANJUNG REDEB – Ketersediaan air bersih di Kecamatan Segah belum merata. Seperti Kampung Tepian Buah, Harapan Jaya dan Gunung Sari. Bahkan, jarak intake dengan rumah pelanggan perlu ditambah jika diperlukan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo menegaskan, hal itu perlu didiskusikan kembali antara legislatif dengan eksekutif serta Perumda Air Minum Batiwakal terkait keluhan masyarakat soal kebutuhan air bersih tersebut.

“Karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Mereka memiliki hak mendapat fasilitas yang maksimal dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, perlu adanya kesesuaian kemampuan saluran Perumda dengan jumlah pelanggan yang ada. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan setiap tahun tentunya jarak intake juga perlu diperhatikan.

“Seperti, jarak dari pelanggan ke pelanggan kalau dirasa kurang memadai, berarti kapasitas intakenya ini harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Falentinus mendorong agar Bupati Berau selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda, untuk segera menindaklanjuti kebutuhan air bersih yang dikeluhkan kampung-kampung yang ada di Kecamatan Segah. Begitu juga dengan kampung lain yang membutuhkan air bersih.

Politikus Demokrat ini meminta perlu adanya peningkatan kualitas lebih lanjut, agar pelayanan air bersih dan air minum untuk masyarakat dapat berjalan lancar.

“Ini sangat penting untuk segera ditangani, baik dari pihak Perumda yang mengetahui jumlah dan kapasitas intakenya. Maupun instansi terkait dalam hal ini DPUPR yang membangun jaringan infrastruktur airnya,” pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

ICHSAN RAPI DORONG PENUNTASAN KAWASAN BLANKSPOT

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan blank spot. Dia menilai, dalam mengatasi blank spot harus menggunakan solusi kreatif dan inovatif.

Dikatakannya, pengentasan blank spot bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk dapat mengakses internet. Terlebih hal tersebut saat ini merupakan kebutuhan mendasar.

“Hal tersebut harus segera dipenuhi, apalagi di era modern seperti saat ini. Seluruh informasi maupun urusan administrasi melalui online,” katanya.

Menurut Ichsan, jika seluruh kampung yang ada di Kabupaten Berau dapat menik-

mati fasilitas telekomunikasi, maka akan terwujud sarana komunikasi publik yang terintegritas.

“Jadi jika tidak ada blank spot lagi di Berau, saya kira bisa memperluas sarana informasi publik,” jelasnya.

Politikus Gerindra ini juga menilai, pengentasan blank spot akan berdampak kepada minat investor. Selain itu juga menarik para wisatawan dengan berbagai informasi-informasi yang telah disajikan melalui online tersebut.

“Bisa saja ada destinasi wisata yang belum kita ketahui di Berau ini akibat terbatasnya sarana telekomunikasi. Jika semua kampung menikmati internet, tentu dengan cepat kita menerima informasi,” tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TOLAK TEGAS PENGHAPUSAN PTT

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan tidak setuju terhadap rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) meski ditunda hingga 2024 mendatang.

Dia menilai, daripada menghapus PTT, sebaiknya diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu, kata Madri, agar kebutuhan birokrasi terus berjalan dengan baik.

Politikus Partai Nasdem ini mengakui, tetap satu perintah dengan Mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor yang berpesan agar tenaga honorer jangan dihapuskan.

"Bagaimana mungkin PTT dihapuskan. Sementara, kebutuhan birokrasi pemerintah baik daerah maupun provinsi menggunakan tenaga PTT yang ada," ucapnya.

Dirinya percaya PTT di setiap instansi bekerja secara optimal. Pun sangat membantu menjalankan roda pemerintahan

Di samping itu perlu juga diperhatikan beberapa jumlah kelulusan mahasiswa di suatu daerah agar tidak terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Terutama mereka yang berpendidikan minimal Strata 1 (S1).

"Saya sekali lagi hanya mengingatkan baik pemerintah pusat maupun provinsi untuk tidak menghapuskan tenaga honorer," tegasnya.

"Bukankan anggaran ini dari rakyat untuk rakyat? Dari pada malah dikorupsi, kenapa tidak dimanfaatkan untuk membayar PTT yang ada?," tanyanya.

Makanya, Madri berharap agar tenaga honorer tetap diperjuangkan. Baik dengan usulan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Perekrutan CPNS dan PPPK inikan jelas tujuannya untuk mengurangi jumlah PTT yang ada," tandasnya. (adv/set)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

MINTA OPD PERSENTASE ANGGARAN BESAR SERAP DENGAN MAKSIMAL

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong menyoroti tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki persentase dana dari APBD Berau terbanyak di lingkungan Pemkab Berau.

Dia memaparkan, tiga OPD tersebut yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau.

“Anggaran di 3 OPD ini memang sangat besar. Apalagi yang menyangkut anggaran fisik dibatasi waktu dan cuaca, serta banyak kendala lainnya,” jelasnya.

Sehingga, diperlukan percepatan penyerapan anggaran agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dengan sisa waktu yang ada diharapkan kinerja dapat dioptimalkan.

“Perlu akselerasi bagaimana supaya dikejar dalam sisa waktu yang ada,” tegasnya.

Memang diakuinya, prosedur administrasi berkas dan lainnya membuat proses penyerapan anggaran menjadi lama. Oleh karenanya, diperlukan kerja ekstra para ASN agar tidak terjadi SILPA.

“Yang kita khawatirkan ini nanti banyak SILPA nanti. Jelas perlu dipercepat kerjanya,” tuturnya.

Dirinya terus mendorong 3 OPD tersebut untuk mempercepat

penyerapan anggaran. Yang mana hingga awal Oktober serapan anggaran baru sekitar 49 persen.

“Dalam perencanaan yang mereka susun itu kan sudah ditentukan jadwal. Ada time schedule yang seharusnya bisa dicapai,” terangnya.

“Tinggal bagaimana respon ketiga OPD itu saja. Apalagi realisasi anggaran yang berupa fisik,” tandasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

KHAWATIR KABUT ASAP MENEBAL, RUDI DORONG PERAN MAKSIMAL OPD TERKAIT

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperhatikan kadar kepekatan udara. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir Bumi Batiwakkal dilanda kabut asap. Hal ini pun dirasa cukup mengganggu aktivitas masyarakat.

Dia mengaku sangat khawatir dengan kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Berau dalam beberapa hari terakhir. Dikawatirkannya, selain mengganggu aktivitas juga akan berpengaruh pada kesehatan.

“Artinya, ini kan menyangkut kesehatan juga. Kita semua, bukan hanya anak-anak saja yang terpapar penyakit,” katanya.

Dikatakan Rudi, kabut yang melanda Be-

rau saat ini bisa dikategorikan sebagai salah satu bencana. Untuk itu, dirinya mengimbau pemerintah bisa melakukan penanggulangan dan jangan menunggu kabut semakin menebal.

“Ini kan suatu bencana, mungkin BPBD bisa aktif dalam kegiatan membagikan masker kepada masyarakat, khususnya anak sekolah,” tuturnya.

Politikus PDI-P ini mengaku sangat mendukung kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) jika kabut semakin menebal.

“Kalau sudah parah sekali, mungkin Dinas Pendidikan (Disdik) bisa menginstruksikan sekolah-sekolah menerapkan Daring. Karena ISPA ini sangat bahaya,” tandasnya. (adv/set)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

PENGERJAAN DRAINASE JANGAN RUSAK WAJAH PERKOTAAN

TANJUNG REDEB – Pembangunan dan peningkatan drainase di beberapa titik perkotaan diharapkan dapat mengatasi genangan air yang masih terjadi di wilayah perkotaan Tanjung Redeb.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman menyarankan, selain fungsi drainase untuk irigasi tentunya keindahan kota pun harus dijaga. Sakirman juga mendorong pembangunan drainase dapat dituntaskan pun tidak ada yang mangkrak.

“Jaringan drainase yang masih diproses ada dua, ada yang langsung pada badan jalan dan langsung pada trotoar, semoga segera dituntaskan,” ucapnya.

Namun, yang perlu diperhatikan yaitu titik-titik banjir yang ada di daerah perkotaan. Diakuinya, pemasangan drainase pada jalur irigasi yang rawan banjir sebagian telah terpasang.

“Semoga beberapa titik banjir yang ada di

Kabupaten Berau dapat teratasi,” harapnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya sebatas pemasangan U-gutter saja tapi tidak dituntaskan secara menyeluruh di bagian atasnya.

“Jangan hanya sebagian saja yang dikeramik dan sebagiannya tidak, jika seperti itu maka keindahan kotanya tidak didapat,” tuturnya.

Terkait pemasangan drainase yang berada di sekitar GOR Pemuda yang terlihat merusak jalan. Dirinya menjelaskan pengerjaannya masih berjalan dan belum selesai. Semoga ketika telah selesai bisa diperbaiki jalan yang telah rusak akibat pemasangan drainase tersebut.

“Jangan hanya irigasinya yang ditingkatkan, pemasangan keramik, penanaman pohon, dan lampu penerangan bisa dipasang. Mengingat jalan tersebut termasuk pintu masuk dan wajah bagi Kabupaten Berau,” tandasnya. (adv/set)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

USUL JEMBATAN KELAY III SEGERA TEREALISASI

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto mengusulkan pembangunan Jembatan Kelay III diprioritaskan pada 2024 mendatang.

Dia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap. "Jembatan kelay III ini merupakan prioritas dari Komisi III. Dari usulan akan dilakukan bertahap dan langkah pertama akan dilakukan pembebasan lahan, kemudian dibangun pondasi dahulu," katanya.

Dirinya mengungkapkan, anggaran yang

akan dikucurkan nantinya terbilang cukup besar, yakni Rp 200 miliar hingga jembatan rampung dibangun.

Menurutnya, pembangunan secara bertahap karena untuk menekan beban anggaran dari Pemkab Berau nantinya. "Jadi langkah kami, sementara jembatan yang ada masih bisa dipakai, mungkin tahun ini akan dilakukan pondasi dahulu atau langkah pertama bisa dibebaskan lahan," paparnya.

"Kita tidak sekaligus menganggarkan sebesar itu. Jadi tahap demi tahap agar tidak membebani APBD kita," tandasnya. (adv/set)



OPERASI ANTIK MAHAKAM 2023, UNGKAP 252 KASUS DENGAN 331 TERSANGKA NARKOBA



**LANAL BALIKPAPAN AMANKAN
JALUR LOGISTIK
PEMBANGUNAN IKN**



Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo didampingi Wakil Direktur Reskoba Polda Kaltim, AKBP Rino Eko menunjukkan barang bukti dan tersangka hasil Operasi Antik Mahakam 2023.

OPERASI ANTIK MAHAKAM 2023, UNGKAP 252 KASUS DENGAN 331 TERSANGKA NARKOBA

BALIKPAPAN - Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) baru saja selesai menggelar Operasi Antik Mahakam 2023 termasuk di Polres jajaran. Dan hasilnya, sebanyak 252 kasus narkoba dengan 331 tersangka berhasil diungkap.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo didampingi Wakil Direktur Reskoba Polda Kaltim, AKBP Rino Eko mengatakan, pengungkapan kasus narkoba lewat Operasi Antik Mahakam 2023 yang berlangsung selama 21 hari yakni mulai 19 September hingga 9 Oktober 2023, merupakan hasil kerja keras dari seluruh personel Polda Kaltim dan Polres jajarannya.

"Dengan jumlah tersangka 331 dengan rincian 306 laki-laki dan

25 orang perempuan," ujar Yusuf, Selasa (10/10/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, dari 252 kasus tersebut, sebanyak 14 kasus di antaranya berhasil diungkap oleh Polda Kaltim.

"Untuk kasus yang ditangani oleh Direktorat Narkoba Polda Kaltim, berhasil mengungkap 14 kasus dengan jumlah tersangka 24 orang," jelasnya.

Sedangkan untuk Polres jajaran, sebanyak 51 kasus berhasil diungkap oleh Polres Samarinda, 29 kasus oleh Polresta Balikpapan, 45 kasus oleh Polres Kutai Kartanegara, 27 kasus oleh Polres Kutai Timur, 14 kasus oleh Polres Kutai Barat, 18 kasus oleh Polres Bontang, 26 kasus oleh Polres Berau, 11 kasus oleh Polres Paser, 14 kasus oleh Polres PPU, dan 3

kasus oleh Polres Mahulu.

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polda Kaltim dan jajarannya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.463,81 gram sabu-sabu, 20 butir ekstasi, 12,3 gram ganja, dan 8.674 butir obat keras.

"Barang bukti tersebut akan dimusnahkan dalam waktu dekat ini," tambah Yusuf.

Yusuf mengaku, bahwa Polda Kaltim akan terus berupaya untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Timur.

"Kami akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Timur," tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Nicha Ratnasari



Danlanal Balikpapan, Kolonel Laut (P) Hendriman Putra saat memimpin patroli di perairan Balikpapan-PPU.

LANAL BALIKPAPAN AMANKAN JALUR LOGISTIK PEMBANGUNAN IKN

BALIKPAPAN - Lanal Balikpapan telah mendapat tugas khusus dari pimpinan pusat, untuk mengamankan jalur logistik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di PPU. Sehingga saat ini kapal-kapal patroli TNI AL sering terlihat di perairan Balikpapan.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan, Kolonel Laut (P) Hendriman Putra mengatakan, disaat bersamaan, personel TNI AL bersiaga di pos-pos logistik untuk memantau pergerakan kapal pengangkut material dan logistik.

"Tugas pokok TNI itu juga ada operasi militer selain perang. Salah satunya mengamankan perairan. TNI hadir untuk memastikan bahwa semua perairan yang berada di wilayah Indonesia akan aman," ujarnya, Selasa (10/10/2023) saat melakukan patroli di perairan Balikpapan-PPU.

Lebih lanjut Danlanal Balikpapan menjelaskan, dalam mendukung pembangunan IKN, Lanal Balikpapan telah ditun-

juk untuk mengamankan jalur logistik yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan. Jalur logistik ini melewati perairan Balikpapan-PPU yang merupakan wilayah kerja Lanal Balikpapan.

"Sejauh ini, pemantauan kita menunjukkan bahwa perairan Balikpapan-PPU cukup kondusif. Artinya, semua stakeholder terkait, masyarakat setempat, dan nelayan setempat cukup kooperatif dalam mendukung pengamanan jalur logistik," jelasnya.

Untuk memantau kelancaran lalu lintas logistik, TNI AL telah mendirikan posko-posko logistik. Pos-pos ini bertugas untuk memantau pergerakan kapal pengangkut material dan logistik untuk pembangunan IKN.

"Kami berharap, keamanan jalur logistik ini dapat terus dipertahankan sehingga pembangunan IKN Nusantara dapat berjalan lancar," tutup Hendriman.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah.

DPRD BALIKPAPAN SOROTI MARAKNYA TOKO RETAIL MODERN

BALIKPAPAN - Toko modern dalam beberapa bulan terakhir ini bermunculan di sejumlah sudut Kota Balikpapan hingga mendekati pemukiman penduduk. Bahkan jumlahnya terus bertambah tiap kawasan.

Tentunya hal ini pun akan berdampak kepada para toko kelontongan. Hal ini pun akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah mengatakan, maraknya toko modern di Kota Balikpapan memang bisa memberikan dampak positif, namun ada dampak lainnya juga, yang dapat berpengaruh terhadap penurunan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha toko tradisional.

"Kami sangat menyoroti masalah itu, karena masyarakat yang berjualan toko kelontongan akan sedikit banyak terganggu perekonomiannya," ujarnya Selasa (10/10/2023).

Laisa menjelaskan, toko retail modern diakui dioperasikan melalui ma-

najemen perusahaan yang lebih rapih dan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini memang lebih baik dari pada toko kelontongan. Namun Laisa menilai bahwa toko kelontongan menjadi penopang keekonomian masyarakat juga.

"Jangan sampai dibiarkan terus menjamur. Mudah-mudahan kami dari Komisi I DPRD Kota Balikpapan bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait menjamurnya toko modern," jelasnya.

Laisa menyampaikan, kemungkinan besar akan ada pembatasan jumlah toko modern, ini untuk mencegah invasi toko modern yang dikhawatirkan akan melumpuhkan ekonomi masyarakat yang ditopang dari toko kelontongan.

"Saya pikir di Balikpapan belum ada (aturan) itu. Kasihan masyarakat yang membuka warung kalau sedikit-sedikit, di mana-mana ada itu," tutupnya. (ADV/DPRDBalikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



BANGUN KERJASAMA DENGAN DPRD PASER, MEDIA KALTIM KENALKAN PRODUK KORAN DIGITAL GRATIS



**MEDIA KALTIM BANGUN SINERGI
DENGAN TOKOH DAN
PEJABAT DI KABUPATEN PASER**



Agus Susanto (kiri) menyerahkan kenang-kenangan kepada Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi (kanan)

BANGUN KERJASAMA DENGAN DPRD PASER, MEDIA KALTIM KENALKAN PRODUK KORAN DIGITAL GRATIS

PASER - Rangkaian Partnership Trip Manajemen Media Kaltim Group terus berlanjut. Kali ini rombongan tiba di Kabupaten Paser.

Selasa (10/10/2023), CEO Media Kaltim, Agus Susanto, Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, bersama Kepala Biro Penajam Paser Utara, Kepala Biro Paser serta Jurnalis Radar Ibukota mengunjungi Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi. Rombongan ditemui dan disambut ramah politisi PKB ini di rumah jabatan Ketua DPRD Paser.

Adapun tujuannya, dijelaskan Agus Susanto, selain memperkuat jalinan kerjasama, pertemuan ini juga sebagai langkah awal kemitraan yang baik antara DPRD Kabupaten Paser dengan Media Kaltim maupun secara personal.

"Kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dengan para tokoh dan pejabat, termasuk di Kabupaten Paser. Alhamdulillah, hari ini kami sampai di Paser dan diterima Pak Hendra Wahyudi," kata Agus membuka pertemuan.

Lebih rinci, Agus menjelaskan bahwa Media Kaltim baru menginjak usia 3 tahun. Dari perjalanannya, Media Kaltim Group telah mendapat banyak kepercayaan menjadi salah satu media yang menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak.

Sehingga, harapan yang sama turut diharapkan dapat terjalin salah satunya di Kabupaten Paser. Tentunya, e-paper atau koran digital, menjadi salah satu produk khas Media Kaltim Group yang bisa dinikmati gratis setiap hari, termasuk telah beredar di Paser.

Sementara itu, Ketua DPRD

Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi menyatakan, terima kasih atas kunjungan Media Kaltim Group di Kabupaten Paser. Harapannya, kehadiran Media Kaltim dapat berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

"Semoga Media Kaltim terus sukses dalam mendukung perkembangan kemajuan Kabupaten Paser di bidang informasi publik," katanya.

Pada momen itu, Agus Susanto menyerahkan kenang-kenangan berupa poster Hendra Wahyudi dengan konsep cover e-paper Media Kaltim. Cover itu turut bertuliskan karakter Ketua DPRD Kabupaten Paser yang cermat dan komunikatif yang dipadu dengan foto bersama.

**Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari**



Mengabadikan bersama Anggota KPID Kaltim Tri Tri Heriyanto (kiri), Anggota Bawaslu Paser Fauzan (dua kiri) dan Ketua KPU Paser periode 2014-2019, Eka Yusda Indrawan (kedua kanan).

MEDIA KALTIM BANGUN SINERGI DENGAN TOKOH DAN PEJABAT DI KABUPATEN PASER

PASER - Dalam rangkaian Partnership Trip Manajemen Media Kaltim Grup yang berlangsung di Kabupaten Paser, CEO Media Kaltim, Agus Susanto dan rombongan, melakukan pertemuan dan berdialog dengan beberapa pejabat dan tokoh penting.

Di antara tokoh dan pejabat yang ditemui Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser, Fauzan, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Tri Heriyanto, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser periode 2014-2019, Eka Yusda Indrawan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Paser dan merupakan momen yang penuh nostalgia bagi Agus Susanto dan para tokoh tersebut. Sebelumnya Agus Susanto pernah bersama-sama satu lembaga

di Bawaslu.

Agus pernah menjabat sebagai Anggota Panwaslu Bontang Periode 2015 dan periode 2017 ketika lembaga ini masih bersifat ad-hock. Agus juga pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Bontang periode 2018-2023.

Selain bernostalgia, Agus Susanto juga menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan rencana Media Kaltim Group ke depan. Ia berharap bahwa pertemuan tersebut akan membuka pintu untuk kerjasama dengan berbagai pihak.

"Selain memperkuat jalinan silaturahmi. Semoga ada juga hal-hal yang bisa dikerjasamakan," ujar Agus Susanto pada Selasa (10/10/2023).

Lebih rinci, Agus menjelaskan bahwa Media Kaltim baru menginjak usia 3 tahun. Dari per-

jalanannya, Media Kaltim Group telah mendapat banyak kepercayaan menjadi salah satu media yang menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak.

Sehingga, harapan yang sama turut diharapkan dapat terjalin salah satunya di Kabupaten Paser. Tentunya, e-paper atau koran digital, menjadi salah satu produk khas Media Kaltim Group yang bisa dinikmati gratis setiap hari tanpa iuran reguler.

Pada momen itu pula, Agus Susanto menyerahkan kenang-kenangan berupa kaos HUT Media Kaltim yang baru dirayakan pada Agustus 2023 lalu. Selain membagikan kenang-kenangan, mantan Komisisioner Bawaslu Bontang ini juga mengabadikan momen kebersamaannya.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
11 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



LAGI, POLRESTA SAMARINDA TANGKAP 2 PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA





LAGI, POLRESTA SAMARINDA TANGKAP 2 PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

SAMARINDA - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap dua orang pelaku di Jalan Gatot Subroto Gg.Lorong Budiman, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sekitar Pukul 10.00 Wita.

Kronologis penangkapan bermula pada hari Senin, 9 Oktober 2023 diterima informasi dari masyarakat bahwa Jalan Gatot Subroto Gg.Lorong Budiman RT.43 No.64, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya dilakukan observasi dengan cermat, sekitar pukul 10.00 Wita, anggota

melakukan pengeledahan pada salah satu rumah yang dicurangi dan ditemukan seorang laki-laki berada dalam kamar pada lantai atas kamar tersebut yang berinisial A (35).

Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,20 gram bruto yang berada di teras samping rumah yang sebelumnya dibuang sendiri oleh A serta barang bukti lainnya.

Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wita datang 1 orang laki-laki pada rumah alamat tersebut yang berinisial RM (34). Setelah dilakukan interogasi bahwa benar A mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari tangan RM.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya

1 poket narkoba jenis sabu seberat 0,20 gram bruto, 1 bendel klip plastic, 1 buah sendok penakar, 1 buah kotak warna hitam merk BOSTANTEN, uang tunai sebesar Rp 150 ribu yang diduga sebagai hasil jual beli transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp1,4 juta yang diduga sebagai hasil jual beli transaksi narkoba jenis sabu-sabu milik RM dan 2 buah HP.

Kedua pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya kedua Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsidier pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari

 Grand Kartika
HOTEL

OK! TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp 698.000,-

30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits**Breakfast**
2 pax**FREE****Laundry**
Up To 2 pcs**FREE****Kopi Inspirasi**
Buy 3, Pay 2**FREE****Afternoon
Tea****FREE****Mini Mantou**
5 pcs**BOOK NOW****0811 581 3669**www.hotelgrandkartika.com